

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dan/atau pengguna barang.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.[1]

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, merupakan salah satu badan yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Sleman.

Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang sangat penting guna menunjang kelancaran dalam menyiapkan kebutuhan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengemban tugas. Perencanaan yang tepat dapat menghemat pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah dan barang/aset daerah.

Dalam melakukan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang harus berdasarkan pada beberapa alasan yang dipertimbangkan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjawab pertanyaan untuk apa aset/barang diperlukan. Dan dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Untuk memenuhi kebutuhan barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan besaran organisasi/jumlah pegawai dalam organisasi dalam mengemban tugas dan pekerjaannya;

Untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;

Untuk memenuhi kebutuhan barang/inventaris guna menunjang pengembangan organisasi dan atau menambah penambahan pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan;

Untuk menjaga ketersediaan barang, terutama barang pakai habis untuk perkiraan pemakaian pada satu tahun yang akan datang;

Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Seperti pembelian computer, printer, scanner, dan lain sebagainya.[2]

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus sesuai dengan rencana kerja SKPD. Dan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 pasal 20 ayat 2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

Standar barang;

Standar kebutuhan;

Standar harga.

Agar dapat melakukan proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tepat dan terperinci tersebut maka dibutuhkan koordinasi yang baik serta sesuai dengan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Namun, pelaporan rencana kebutuhan barang milik daerah ini sering tidak sesuai dengan program, kegiatan, dan standar yang telah ditentukan, sehingga terdapat banyak revisi saat proses verifikasi. Hal ini lah yang menyebabkan keterlambatan pelaporan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Sistem informasi (*informaton sistem*) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (O'Brian,2005). Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikansinergi organisasi pada proses (Murdick dan Ross, 1993) [6].

Oleh karena itu, untuk mencegah keterlambatan pelaporan dan mengurangi kekeliruan data rencana kebutuhan barang milik daerah, maka diperlukan suatu sistem

informasi manajemen perencanaan yang tepat dalam pengolahan data perencanaan kebutuhan barang milik daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana cara perancangan dan pembuatan sistem informasi manajemen perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dibuat adalah sistem yang didasarkan hanya pada proses bisnis perencanaan kebutuhan barang milik daerah di BKAD Kabupaten Sleman.
2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan untuk databasenya menggunakan MySQL.
3. Sistem informasi yang dibuat khusus digunakan untuk perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk merancang dan membuat sistem informasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu dalam proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Sehingga SKPD terkait dapat melakukan pengolahan data barang-barang menjadi informasi yang cepat, tepat dan akurat. Sehingga mengurangi beban SKPD, dan meningkatkan produktivitas kerja serta melancarkan aktivitas bisnis di dalam SKPD terkait.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data, metode perancangan, dan metode pengembangan

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1.6.1.1 Metode Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset Daerah Kabupaten Sleman, yang berkaitan dengan proses bisnis perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang berjalan saat ini.

1.6.1.2 Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung proses kerja staff guna mendapatkan berbagai informasi atau data yang diperlukan dalam merancang dan membangun aplikasi tersebut.

1.6.1.3 Metode Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui buku-buku, laporan-laporan, jurnal dan catatan yang bisa dijadikan rujukan.

1.6.2 Metode Analisis

Setelah metode pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan metode analisis. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan metode PIECES, analisis kebutuhan, analisis biaya dan manfaat, dan analisis kelayakan. Tahap analisis sistem dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh proses bisnis. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses yang dilakukan.

1.6.3 Metode Perancangan

Metode perancangan yang dilakukan dengan pemodelan basis data yang meliputi perancangan ERD (*Entity Relationship Diagram*), *Flowchart*, dan UML (*Unified Modelling Language*).

1.6.4 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yaitu pembangunan sistem informasi manajemen berdasarkan alur kerja, dan proses bisnis pada BKAD. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengembangan SDLC (*System Development Life Cycle*).

1.6.5 Metode Pengujian Sistem

Setelah selesai melakukan pengembangan sistem, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian sistem menggunakan *Black-Box Testing* yang merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, penguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengujian pada spesifikasi fungsional program. Selain itu juga melakukan pengujian sistem menggunakan *White-Box Testing* untuk mencegah kesalahan logika, ketidaksesuaian asumsi, dan kesalahan pengetikan pada kode program.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan pokok-pokok permasalahannya. Sistematika penulisan secara umum dari laporan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian sebelumnya dan landasan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisis permasalahan dan perancangan sistem serta batasan dari perancangan program.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang penerapan sistem yang terdiri dari pembentukan program aplikasi serta kebutuhan *hardware* dan *software*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan hasil analisa dan masukan kepada pihak tempat penelitian.

